



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pebisnis Tempati Hampir Separuh Parlemen  
Tanggal : Rabu, 02 Oktober 2019  
Surat Kabar : Koran Tempo  
Halaman : 2

## Pebisnis Tempati Hampir Separuh Parlemen

Sebanyak 262 anggota DPR terafiliasi atau terlibat dalam 1.016 perusahaan.

Avit Hidayat  
avit.hidayat@tempo.co.id

**JAKARTA**—Kalangan pengusaha menempati posisi cukup besar dalam komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang dilantik kemarin. Hasil penelusuran *Yayasan Aurora Nusantara*—lembaga non-pemerintah pemeringkat sumber daya alam dan *Tempo* menemukan 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Nama mereka tercatat pada 1.016 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Jumlah ini ada kemungkinan bertambah lantaran belum mencakup sejumlah anggota data yang belum bisa diakses sejak draf calon tetap di Komisi Penilitian Umum. Temuan ini juga hanya menghitung data perseroan terbatas, ti-

dak menyertakan kepengurusan anggota DPR pada persekutuan komunitas (CV) dan usaha dagang (UD).

Direktur Komunikasi *Yayasan Aurora Nusantara*, Syahrul Fitra, mengatakan hasil riset ini menunjukkan para legislator tersebut menjalankan usaha di bidang perniyarian, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif. "Kami khawatir kalau ada konflik kepentingan. Dampaknya produk legislatif hanya menguntungkan investasi mereka," kata dia, kemarin.

Menurut Syahrul, konflik kepentingan berpotensi terjadi saat DPR membahas rancangan undang-undang yang bersinggungan dengan bisnis mereka. Dia memberi contoh DPR periode lalu yang menggesahkan revisi Undang-Undang Komisi Perberantasan Korupsi dan Undang-Undang Sumber Daya Air secara tergesa-gesa di akhir masa jabatan mereka.

Ariza Bima mengatakan memiliki dua perusahaan berna- ma PT Kaze International Selaras dan PT Hasil USA Anak Bangsa, Keduanya beralamat di Padang.

André diketahui memiliki lima perusahaan, yakni PT Suara Rakyat Membangun, PT Serongga Energi, PT Purnama Gemilang Sinergi, PT Lester Boemi Mandiri, dan PT Dharma Herbivora. Di perusahaan ini, nama mantan Ketua DPR tersebut tercatat sebagai direktur dan komisaris.

Banyaknya anggota DPR berlatar belakang pengusaha juga pernah diungkapkan Indonesia Corruption Watch.

Menurut riset lembaga tersebut, dari 560 anggota DPR periode 2014-

2019, sebanyak 293 orang atau 52 persen berstatus pengusaha.

Saat dimintai konfirmasi, André tak membantahnya. "Perusahaan itu udah *close*," katanya. Meski tak terkait langsung dengan bisnisnya, André tak menampik jika dirinya dikatakan menghabiskan dana miliaran rupiah selama pemilu lalu. "Saya enggan mengaku habis belasan, tapi sudah miliaran rupiah," ujarnya.

Ariza Bima juga mengaku sebagian perusahaan itu adalah miliknya dan Kencana Kirana. Ia mengatakan Kertabumi merupakan lembaga nonpemerintah di bidang lingkungan. "Kencana Kirana sudah ditutup," katanya. Ia juga meminta *Tempo* menyebut nama perusahaan lain yang diduga miliknya, kemudian dia akan memverifikasi.

Sedangkan Bambang hanya membenarkan memiliki PT Suara Rakyat Membangun. Ia pun tak mempermasalahkan jika para pengusaha menjadi anggota DPR. "Sebetulnya bagus, asal tidak ada konflik kepentingan dengan jabatannya sendiri," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, juga tak mempersoalkan hal ini. Ia menganggap wajar jika sebagian putar haluan menjadi legislator. "Untuk menghilangkan konflik kepentingan, kembali ke konsistensi partai. Bukti selama sepuluh tahun di DPR, alhamdulillah enggak ada yang terlibat kasus korupsi," ujarnya.

• BUDIARTI UTAMI PUTRI | VINDRY FLORENTIN | AVIT HIDAYAT

### Berjanji Tak Ada Konflik Kepentingan

**PENELUSURAN** *Yayasan Aurora Nusantara* dan *Tempo* mendapati ada 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang berlatar belakang pengusaha. Sebagian dari mereka memastikan tak bakal ada konflik kepentingan ketika di parlemen.

NASKAH: AVIT HIDAYAT | VINDRY FLORENTIN  
SUMBER: WIWANCARA

"Pengusaha kan ada sakanya. Kalau pengusaha, kan justru bagus. Untungnya kalau pengusaha jadi anggota di DPR, sudah mapan saat mengabdi, enggak perlu uang." —Riza Patria (Gerindra)

"Kalau di negara maju, rata-rata politisinya mapan dulu. Sebetulnya bagus, asal tidak ada konflik kepentingan dengan jabatannya sendiri." —Bambang Soesatyo (Golkar)

"Tentu saya ingin memperjuangkan rakyat, kalau bisnis sudah jalan. Kami kan enggak maruk-maruk banget." —André Rosiade (Gerindra)

"Saya lebih menempatkan hal-hal yang *public-oriented*. Kepentingan pribadi, kapital, jadi nomor sekian. Rusak republik ini kalau kepentingan kapital menimbulkan kewajiban kebijakan Dewan." —Ariza Bima (PDI P)



FOTO: FOTO: TEMPO/DARSHI RIZQI ANDI, DOK: TEMPO/FAKHRI HUDA, DOK: TEMPO/ANDRE ROSIADE, TEMPO/SUBEKTI